

Analisis Pemetaan Sekolah Unggulan Terintegrasi di Pulau Kalimantan: Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan

Atika Tegar Imawati¹, Atika Faza Izzati², Jonathan Purba³, Pasha Novia⁴, Ulfa Rahma⁵

^{1,2,3,4,5} Politeknik Keuangan Negara STAN

atika_4111230085@pknstan.ac.id¹, atika_4111230057@pknstan.ac.id², jojo_4111230173@pknstan.ac.id³,

pasha_4111230082@pknstan.ac.id⁴, ulfa_4111230048@pknstan.ac.id⁵.

+62 896-7572-0205

Keywords: *integrated
flagship school,
education, regrouping.*

ABSTRACT

Education is fundamental to improving the quality of human resources and ensuring socio-economic development. This study aims to map the projection of integrated flagship schools in Kalimantan Island. The data sources used are Basic Education Data, the data portal of the Ministry of Education and Culture, the Central Statistics Agency (BPS), and Podes statistical data. Data collection techniques were literature study and holistic analysis. Data processing was done with Microsoft Excel and Quantum-GIS. The results show that the appropriate method in building integrated flagship schools is the regrouping method based on cost and efficiency considerations. Furthermore, the location of integrated flagship schools should be focused on areas with relatively few education units with a larger number of LTMs and a wider area.

Kata Kunci: sekolah
unggulan terintegrasi,
pendidikan,
pengelompokan.

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjamin perkembangan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan proyeksi sekolah unggulan terintegrasi di Pulau Kalimantan. Sumber data yang digunakan Data Pokok Pendidikan, portal data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan data statistik Podes. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode studi pustaka dan analisis holistik. Pengolahan data dilakukan dengan Microsoft Excel dan Quantum-GIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang tepat dalam membangun sekolah unggulan terintegrasi ialah metode pengelompokan (regrouping) berdasarkan pertimbangan biaya dan efisiensi. Selanjutnya, lokasi sekolah unggulan terintegrasi sebaiknya difokuskan pada daerah dengan satuan pendidikan yang relatif sedikit dengan jumlah LTM yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas.

How to cite: Imawati *et al.* (2025). Analisis Pemetaan Sekolah Unggulan Terintegrasi di Pulau Kalimantan: Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Acitya Ardana*, 5(2), 155-178.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pendidikan termasuk kebutuhan dasar manusia. Hal itu sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjamin perkembangan sosial-ekonomi (Todaro & Smith, 2000). Program pendidikan yang dirancang secara terpadu dan berkelanjutan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial (Arbianti & Suchaina, 2025). Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus diselenggarakan secara merata sehingga hak warga negara dapat terpenuhi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rentang koefisien gini di Indonesia pada tahun 2024 lalu berkisar 0,379 hingga 0,381. Ketimpangan capaian pendidikan terjadi karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan (Alonzo, 1995). Pemerintah dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 mengadopsi struktur Agenda Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yang terdiri dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Agenda transformasi sosial fokus pada pendidikan yang bertujuan menjadi bagian penting dalam membangun manusia berkualitas (Puspa, *et.al.*, 2023).

Selanjutnya Transformasi ekonomi berfungsi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif, penerapan ekonomi hijau, serta transformasi digital. Rosani, *et.al.* (2024) menyatakan bahwa investasi pendidikan merupakan determinan utama dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, transformasi tata kelola menekankan peningkatan kapasitas institusi publik, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (Undang, 2024). Selain itu, agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia menjadi landasan bagi pembangunan yang adil dan stabil melalui kerangka hukum, termasuk reformasi pengawasan profesi hukum yang adaptif terhadap dinamika digitalisasi tata kelola pemerintahan (Suryahartati & Mahardika, 2025). Sementara itu, ketahanan sosial budaya dan ekologi menempatkan pendidikan sebagai kemampuan masyarakat dalam menjaga identitas, solidaritas, serta kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan struktural (Valentina & Elsera, 2023).

Sejalan dengan agenda tersebut, Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 mengelaborasi pengimplementasiannya melalui Asta Cita dengan mencanangkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat, salah satunya ialah membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten serta memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi. Sekolah unggulan tersebut terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas dan akan dibangun dengan model sekolah unggulan berbasis asrama (*boarding*) ataupun tanpa asrama (*non-boarding school*). Secara khusus, dalam RPJMN tahun 2025-2029, pemerintah menyoroti indikasi intervensi di Pulau Kalimantan. Pengadaan sekolah berpola asrama menjadi program yang memerlukan perhatian khusus (Kementerian PPN/Bappenas, 2024). Selain model sekolah, infrastruktur juga menjadi hal yang penting. Infrastruktur berupa

jalan memiliki korelasi positif dengan akses sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan (Arifin. B, *et. al.* 2024).

Meskipun pemenuhan infrastruktur penting, efektivitas kebijakan ini tergantung pada landasan data penelitian yang kuat. Analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Geografis (GIS) telah menjadi instrumen standar dalam menganalisis persebaran sarana publik. Salsabila dan Rudiman (2021) memetakan persebaran sekolah di Samarinda menggunakan metode *K-means clustering*, sementara Pora *et al.* (2023) menggunakan *Arcview GIS* untuk memetakan lokasi sekolah di wilayah pedalaman guna mempermudah akses informasi. Terkait kebijakan penggabungan sekolah, Erowati *et al.* (2018) menekankan bahwa *regrouping* efektif dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik dan meningkatkan fasilitas sekolah melalui konsolidasi anggaran. Selain itu, Sudiyono (2009) dan Octavia *et al.* (2018) menyoroti aspek efisiensi manajerial serta transisi budaya organisasi pascapenggabungan. Namun, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, yakni kurangnya kajian yang mengintegrasikan data angka Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dengan analisis spasial berskala regional makro di seluruh Pulau Kalimantan. Kebanyakan studi saat ini masih bersifat lokal tingkat kota atau kabupaten dan belum mengevaluasi model “Sekolah Unggul Garuda” yang baru dicanangkan dalam visi Asta Cita.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu memvisualisasikan persebaran pendidikan di tiap daerah Pulau Kalimantan baik untuk keperluan pemerataan fasilitas maupun tenaga kerja bagi satuan pendidikan. Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi sangat penting karena dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah 3T. Sekolah yang terintegrasi dengan baik dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah untuk memberikan cara yang lebih adil untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi bagi rakyat Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyusun strategi optimal guna membangun sekolah unggulan terintegrasi di Pulau Kalimantan, dengan memperhitungkan jumlah dan rasio guru-murid, angka putus sekolah, lokasi sekolah, serta persebaran infrastruktur pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk memetakan lokasi dan sekolah-sekolah yang layak bertransformasi menjadi sekolah unggulan terintegrasi di Pulau Kalimantan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data (baik angka atau data kualitatif yang diangkakan), misalnya data dari skala pengukuran (Abubakar, 2021). Sumber data yang diperoleh untuk penelitian berasal dari laman situs Data Pokok Pendidikan setiap provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, portal data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing provinsi, dan juga data statistik Podes. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode studi pustaka dan analisis holistik dengan mencari di sumber atau website terpercaya milik pemerintah. Pengolahan data utamanya dilakukan melalui Microsoft Excel dan Quantum-GIS.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi dengan alat pengolahan data menggunakan program Stata. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: jumlah siswa LTM (Lulus Tidak Melanjutkan) ke jenjang selanjutnya, jumlah murid dan guru, rasio perbandingan antara guru dan murid, klasifikasi rasio murid dan guru,

jumlah satuan pendidikan (sekolah) di tiap kecamatannya, dan seterusnya. Hasil penelitian kemudian menjadi pertimbangan untuk pemerataan pendidikan, misalnya dengan pembangunan sekolah di daerah yang memiliki rasio guru dan murid yang sangat timpang ataupun korelasi antara LTM dengan kemiskinan pada kabupaten tiap provinsi di Pulau Kalimantan. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data pemerintah, jurnal akademik, dan bahan pembelajaran dari dosen sebagai sumber informasi yang valid dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari berbagai penelitian terdahulu, diperoleh kesimpulan bahwa pendidikan dapat memberikan kontribusi langsung untuk mendorong pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat itu sendiri, sehingga melalui peningkatan kualitas pendidikan yang ada diharapkan dapat mengatasi masalah keterbelakangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Mulyadi, 2017). Tujuan pendidikan nasional diletakkan pada tiga pilar, yaitu (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Namun, masih terdapat ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, guna meratakan pendidikan di Indonesia, pemerintah Indonesia mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kebijakan penuntasan Wajib Belajar 12 tahun di daerah tertinggal dapat dilaksanakan dengan program utama pada peningkatan pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan yang seiring dengan kebijakan Rencana Strategis setiap daerah. Harahap, *et al.* (2020) menyatakan bahwa ketimpangan pendidikan di Kalimantan Timur dipengaruhi secara signifikan oleh adanya ketimpangan pendapatan, kemiskinan, serta ketimpangan gender. Darmawati & Suhariyanto (2019) menyatakan bahwa Kawasan Timur Indonesia, termasuk seluruh Pulau Kalimantan, memiliki kesenjangan akses pendidikan yang lebih besar dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia. Ayuningtyas (2021) menyebutkan Beberapa saran kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan, terutama untuk pendidikan menengah. Kebijakan tersebut seperti memperbanyak jumlah sekolah menengah di wilayah pedesaan, mempermudah akses menuju sekolah melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, penyediaan sarana transportasi yang mudah, murah, dan layak bagi anak sekolah, serta penyediaan fasilitas asrama/tempat tinggal bagi anak yang bersekolah di wilayah di luar tempat tinggalnya.

Hamzah, Rosyadi, & Kartika (2017) menyatakan bahwa kondisi ketimpangan pendidikan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2011-2015 berfluktuasi. Pada tahun 2015, sebanyak 13 kabupaten/kota telah berada dalam kategori ketimpangan pendidikan tingkat rendah dan hanya Kabupaten Kayong Utara yang masih dalam kategori ketimpangan pendidikan tingkat sedang. Ketimpangan pendidikan di wilayah kabupaten selalu lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan. Sementara itu, Safitri dan Effendi (2019) menyatakan perbedaan kualitas pendidikan di tiap wilayah di Kalimantan Selatan menyebabkan sumber daya manusia yang dihasilkan pun berbeda, kualitas pendidikan di daerah pedesaan dengan perkotaan berbeda seperti fasilitas pendidikan, tenaga pendidik dan rendahnya kualitas pembelajaran. Kualitas pendidikan di

Kalimantan Selatan dapat dilihat dari lebih banyaknya jumlah penduduk miskin yang ada di daerah pedesaan daripada jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan.

Astuti dan Hukom (2023) menyatakan bahwa disparitas pendapatan antar daerah di Kalimantan Tengah secara positif dan marginal dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia. Akibatnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan pengakuan publik yang lebih besar terhadap nilai pendidikan sebagai investasi manusia. Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM dapat dicapai melalui fokus pemerintah pada sektor kesehatan dan pemajuan pendidikan vokasi di sektor industri. Anistikmalia, Kharisma, & Budiono (2022) menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi yang harus menjadi pusat perhatian dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, yakni dimensi infrastruktur dasar yang berfokus pada akses air minum layak, dimensi pendidikan dengan fokus, pencapaian lama sekolah, dan dimensi moneter yang berfokus pada peningkatan pendapatan.

Kebijakan penggabungan (*regrouping*) sekolah sebagai langkah pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam peningkatan mutu dan penghapusan kesenjangan antar sekolah. Penggabungan sekolah dilakukan pada dua atau lebih sekolah yang memiliki jumlah peserta didik yang kurang dari kapasitas daya tampung sekolah (Octavia, 2018). Penggabungan beberapa sekolah dan menjadikannya sekolah unggulan merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik. Menurut seorang ahli manajemen, penggabungan sekolah diperlukan karena ketidakefisiennya manajemen sekolah seperti rasio guru dengan siswa kurang, beban kerja guru kurang, dan masalah distribusi guru yang tidak merata (Triwiyanto, 2017).

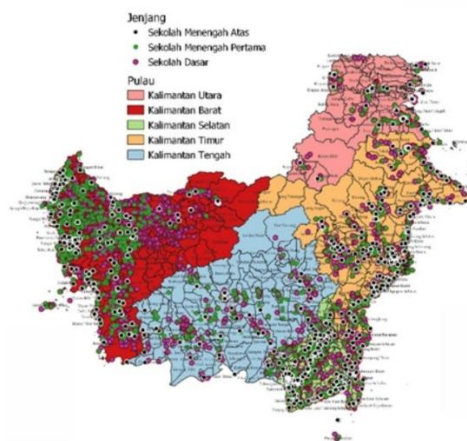
Sekolah unggulan didefinisikan sebagai lembaga pendidikan yang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas dengan kurikulum yang lebih maju, fasilitas lengkap, dan program pembelajaran yang inovatif. Sekolah unggulan merupakan salah satu alternatif yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kualitas SDM. Sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan pendidikan memiliki posisi strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekolah unggulan dapat dilihat dari berbagai sisi, misalnya sekolah yang menawarkan fasilitas serba lengkap atau sekolah yang menekankan pada iklim belajar yang positif serta pembelajaran kondusif (Komarudin & Shofiyyah, 2023). Menurut Budiyo (2011) penggabungan beberapa sekolah dilakukan apabila sekolah memiliki jumlah siswa kurang dari daya tampung dalam rangka efisiensi dan keefektifan anggaran pendidikan dan menciptakan suatu kondisi dimana siswa dan guru dapat mengembangkan diri dengan baik yang berdampak positif terhadap prestasi siswa walaupun bisa berdampak negatif seperti penurunan ranking sekolah dan terganggunya hubungan sekolah dengan masyarakat.

Wigatiningrum dan Alip (2015) menjelaskan bahwa penggabungan sekolah memiliki manfaat positif, antara lain efisiensi anggaran, optimalisasi fasilitas, peningkatan jumlah siswa, peningkatan kompetensi guru. Kebijakan penggabungan sekolah ini juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menekankan pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Menurut Haris Budiyo (2011) menjelaskan bahwa proses sosialisasi dan implementasi kebijakan penggabungan sekolah memerlukan sikap kooperatif dan partisipatif *stakeholders* pendidikan tiap sekolah, baik

yang digabung maupun yang digabungkan sehingga dua kepentingan dapat dikelola dan dicapai dengan baik. Penggabungan sekolah yang dikelola dengan baik, perencanaan yang matang, serta peran kepala sekolah yang optimal akan memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan sekolah. Sebab dengan hanya satu kepala sekolah di satu kompleks SD, akan terjadi efisiensi dan kemudahan dalam pengawasan (crayonpedia, 2009: 3).

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Indrayani (2013) menunjukkan bahwa setelah *regrouping* berjalan efektif, efektivitas manajemen sekolah juga terjadi pada setiap komponen yaitu manajemen pembelajaran, manajemen kesiswaan, manajemen kepegawaian, manajemen sarana/prasarana, manajemen keuangan, manajemen humas, dan manajemen layanan khusus, sekolah juga menunjukkan iklim sekolah yang baik (kondusif). Iklim sekolah ini meliputi lingkungan yang kondusif dan fasilitas belajar yang menyenangkan. Selain itu, penelitian Sudiyono (2009) menegaskan bahwa *regrouping* sekolah merupakan langkah strategis dalam pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemerataan tenaga pendidik. Penelitian lain oleh Mariyadi, Subiyantoro, dan Sukarno (2023) juga mengungkapkan bahwa meskipun penggabungan sekolah membawa dampak positif, keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur dan penerimaan dari masyarakat setempat.

Untuk membangun sekolah unggulan terintegrasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, setiap daerah perlu dianalisis lebih lanjut terkait dengan jumlah tenaga pendidik, peserta didik, hingga kondisi geografis. Sebagai pulau terbesar kedua di Indonesia, Pulau Kalimantan memiliki bentang alam yang bervariasi. Bentang alam tersebut turut mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi. Data jumlah tenaga pendidik dan peserta didik secara menyeluruh diambil dari data dapodik. Analisis dilakukan dengan menghitung rasio ideal jumlah peserta didik dan tenaga pendidik dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yaitu: jenjang SD sebanyak 20 hingga 28 peserta didik, jenjang SMP sebanyak 20 hingga 32 peserta didik, dan SMA sebanyak 20-36 peserta didik. Kemudian, hasil rasio yang kurang ideal dieliminasi dengan mengacu pada standar persyaratan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, yaitu sejumlah 60 peserta didik tiap sekolah. Berikutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan peta persebaran satuan pendidikan tiap kabupaten dan sebaran jumlah LTM.



Gambar 1. Persebaran Satpen Semua Provinsi di Pulau Kalimantan

Penentuan titik lokasi persebaran menggunakan metode *regrouping*, yaitu menggabungkan sekolah yang telah dihitung rasio tenaga pendidik dan jumlah peserta didik, serta jarak antar sekolah. Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan biaya pembangunan dan upaya efisiensi fasilitas pendidikan.

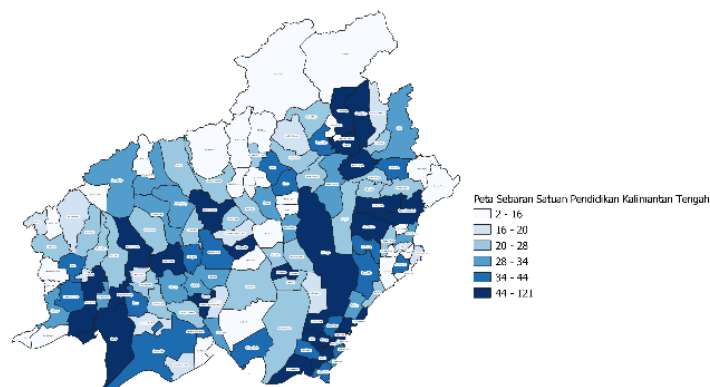
Tabel 1. Korelasi antara Satpen dengan Sekolah yang Memiliki Rasio Guru-Murid yang Ideal

corr satpen rasiobaik (obs=14)		
	satpen	rasiobaik
satpen	1.000	
rasiobaik	0.6107	1.000

Dengan menggunakan analisis korelasi antara variabel satuan pendidikan dan rasio ideal tenaga pendidik dan peserta didik, diperoleh kesimpulan bahwa semakin banyak satuan pendidikan di suatu daerah, maka rasio sekolah berkualitas baik cenderung meningkat.

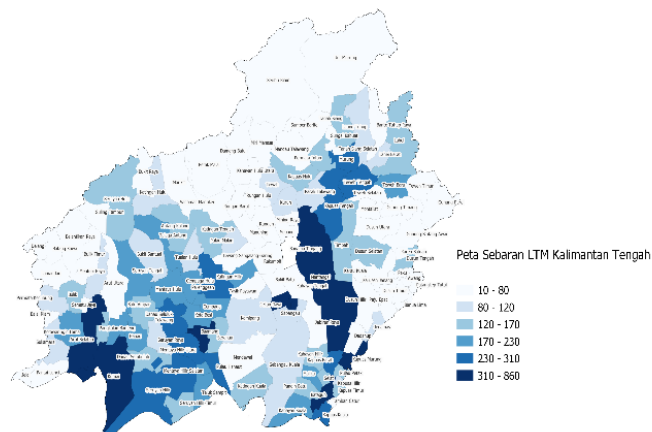
Provinsi Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km². Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 14 kabupaten/kota dengan ibukota Palangkaraya. Secara keseluruhan dari hasil olah data, satuan pendidikan di Kalimantan Tengah cenderung lebih merata antar daerahnya. Setiap kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki satuan pendidikan yang aktif beroperasi.



Gambar 2. *Heatmap* Sebaran Jumlah Satuan Pendidikan Tiap Kecamatan di Kalimantan Tengah

Penentuan peta persebaran satuan pendidikan tersebut menunjukkan bahwa setiap kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki satuan pendidikan yang aktif beroperasi dengan jumlah yang bervariasi.



Gambar 3. Heatmap Sebaran Jumlah LTM Tiap Kecamatan di Kalimantan Tengah

Dari visualisasi persebaran Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) pun terlihat bahwa jumlah anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan tidak terlalu signifikan. Penentuan titik lokasi sekolah unggulan terintegrasi memperhatikan jumlah satuan pendidikan yang masih aktif beroperasi, jumlah LTM, dan rasio antara jumlah peserta didik dengan jumlah tenaga pendidik.

Tabel 2. Perencanaan Sekolah Unggulan untuk Kabupaten di Kalimantan Tengah

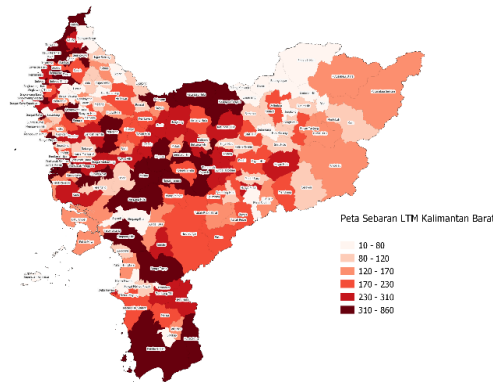
Kab/Kota	Sekolah Unggulan
Barito Selatan	Sekolah Garuda 1
Barito Timur	Sekolah Garuda 2
Barito Utara	Sekolah Garuda 3
Gunung Mas	Sekolah Garuda 4
Kapuas	Sekolah Garuda 5
Katingan	Sekolah Garuda 6
Kotawaringin Barat	Sekolah Garuda 7
Kotawaringin Timur	Sekolah Garuda 8
Lamandau	Sekolah Garuda 9
Murung Raya	Sekolah Garuda 10
Pulang Pisau	Sekolah Garuda 11
Seruyan	Sekolah Garuda 12
Sukamara	Sekolah Garuda 13
Palangkaraya	Sekolah Garuda 14

Kabupaten Barito Timur menjadi prioritas pembangunan sekolah unggulan di Provinsi Kalimantan Tengah karena persebaran satuan pendidikan di Kabupaten Barito tergolong sedang dengan tingkat LTM yang juga sedang. Sementara itu, di daerah lain kondisi persebaran satuan pendidikan tergolong tinggi dengan tingkat LTM yang cenderung sedang dan rendah sehingga proporsinya seimbang. Selain itu, bentang alam di Provinsi

Kalimantan tengah didominasi oleh hutan hujan tropis sehingga terkait solusi, bus sekolah menjadi alternatif rekomendasi yang paling disarankan.

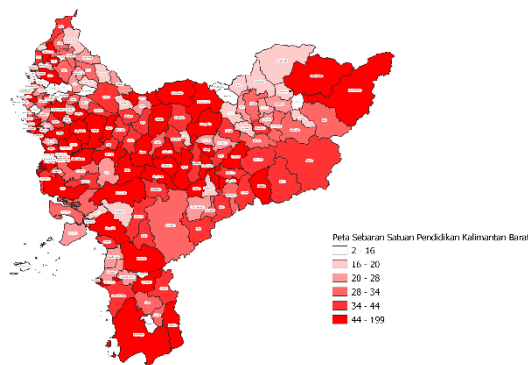
Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi terbesar kedua di Pulau Kalimantan dengan ukuran wilayah mencapai 147.307 km². Akan tetapi, Kalimantan Barat justru menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak: 336 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024).



Gambar 4. *Heatmap* Sebaran Jumlah LTM Tiap Kecamatan di Kalimantan Barat

Sesuai dengan peta pada Gambar 4, beberapa daerah memiliki warna merah gelap pekat, artinya banyak kecamatan di Kalimantan Barat yang memilih untuk meninggalkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Dalam Kecamatan Menyuke ditemukan ada 161 penduduk lulusan tingkat SMP yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya.



Gambar 5. *Heatmap* Sebaran Jumlah Satuan Pendidikan Tiap Kecamatan di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat masih belum mendapatkan persebaran sekolah yang mumpuni, dapat dilihat dari Gambar 5. Salah satu alasan mengapa murid yang lulus memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dapat disebabkan oleh jumlah sekolah yang tidak merata dan jauh dari tempat tinggal sehingga penduduknya lebih memilih untuk bekerja langsung.

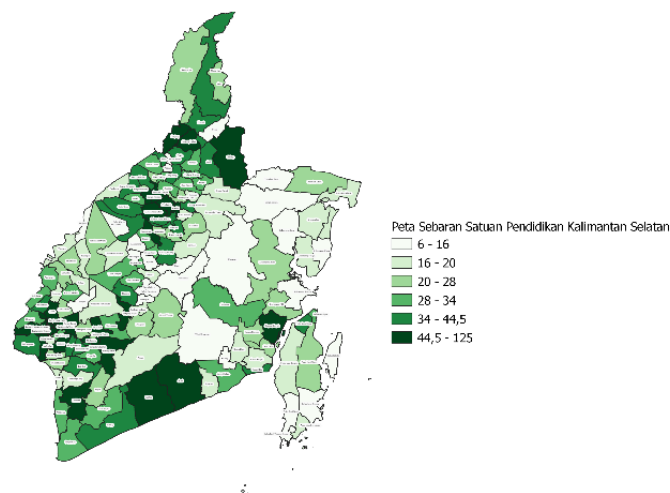
Adapun faktor seperti masalah di rute saat berjalan kaki dari rumah murid mencapai ke sekolahnya, misalnya jembatan rubuh, jalan hanyut oleh banjir, tanah longsor, dan sebagainya.

Tabel 3. Perencanaan Sekolah Unggulan untuk Kabupaten di Kalimantan Barat

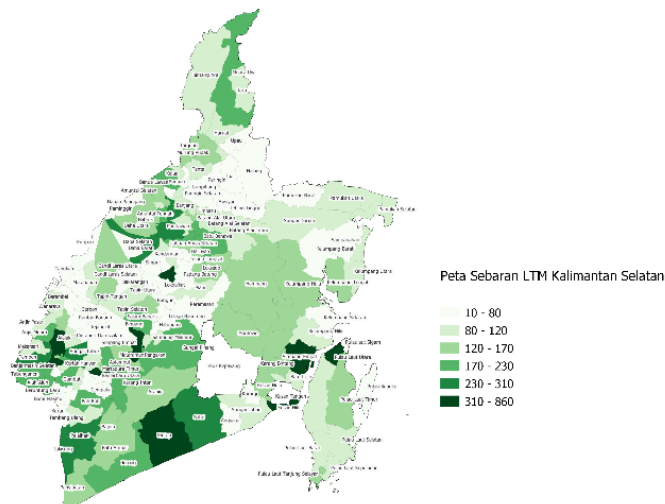
Kab/Kota	Sekolah Unggulan
Kendawangan	Sekolah Garuda 1
Nanga Tayap	Sekolah Garuda 2
Manis Mata	Sekolah Garuda 3
Simpang Hulu	Sekolah Garuda 4
Tumbang Titi	Sekolah Garuda 5
Tebas	Sekolah Garuda 6
Sambas	Sekolah Garuda 7
Sejangkung	Sekolah Garuda 8
Sajad	Sekolah Garuda 9
Sungai Raya	Sekolah Garuda 10

Provinsi Kalimantan Selatan

Sejak dulu, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan. Secara geografis, Dengan dua kota dan sebelas kabupaten, kondisi geografis Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh perairan berupa laut dan sungai. Dari peta persebaran satuan pendidikan menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan terkonsentrasi di Kota Banjarmasin yang mana merupakan daratan sekaligus ibukota provinsi. Berbanding terbalik dengan wilayah daratan, satuan pendidikan di wilayah pesisir, khususnya Kabupaten Kotabaru cenderung tidak merata. Faktor geografis dan infrastruktur sulit dijangkau sehingga menghambat pemerataan distribusi fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik.



Gambar 6. *Heatmap* Sebaran Jumlah Satuan Pendidikan Tiap Kecamatan di Kalimantan Selatan



Gambar 7. *Heatmap* Sebaran Jumlah LTM Tiap Kecamatan di Kalimantan Selatan

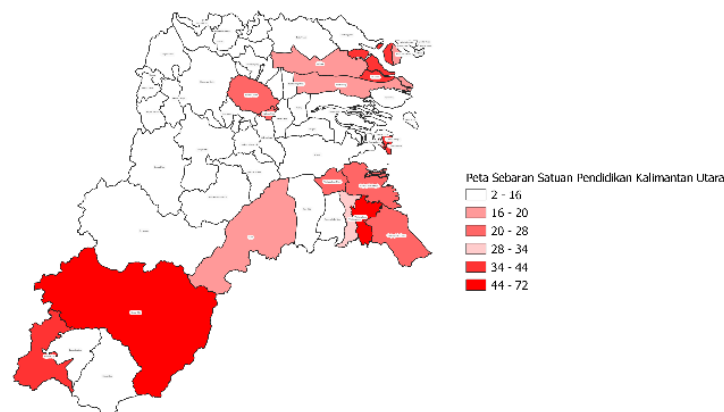
Sementara, jumlah LTM di Provinsi Kalimantan Selatan tidak sebanyak di Provinsi Kalimantan Tengah dan tersebar lebih banyak di area perairan. Bentang alam yang demikian mengarahkan rekomendasi solusi untuk membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan model asrama.

Tabel 4. Perencanaan Sekolah Unggulan untuk Kabupaten di Kalimantan Selatan

Kab/Kota	Sekolah Unggulan
Barito Kuala	Sekolah Garuda 1
Hulu Sungai Tengah	Sekolah Garuda 2
Kotabaru	Sekolah Garuda 3
	Sekolah Garuda 4
Banjarbaru	Sekolah Garuda 5
Banjarmasin	Sekolah Garuda 6
Tapin	Sekolah Garuda 7
Banjar	Sekolah Garuda 8
Tanah Bumbu	Sekolah Garuda 9
Tabalong	Sekolah Garuda 10
Hulu Sungai Selatan	Sekolah Garuda 11
Tanah Laut	Sekolah Garuda 12
Balangan	Sekolah Garuda 13
Hulu Sungai Utara	Sekolah Garuda 14

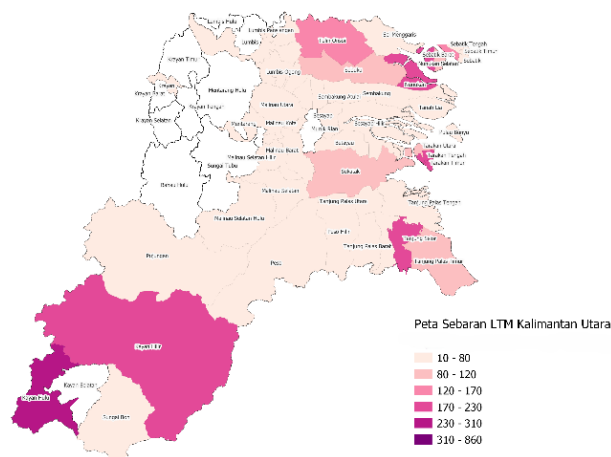
Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi termuda di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Tanjung Selor. Secara geografis, Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Malaysia. Karena status pemekaran, Kalimantan Utara masih menghadapi banyak tantangan seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemerataan pembangunan, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman.



Gambar 8. *Heatmap* Sebaran Jumlah Satuan Pendidikan Tiap Kecamatan di Kalimantan Utara

Peta persebaran satuan pendidikan tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Utara masih sangat terbatas dalam hal pembangunan satuan pendidikannya.



Gambar 9. *Heatmap* Sebaran Jumlah LTM Tiap Kecamatan di Kalimantan Utara

Untuk peta persebaran LTM pun sejalan dengan peta sebaran satuan pendidikan di atas, ini artinya dengan peserta didik dan satuan pendidikan yang sedikit dan kurang memadai, jumlah LTM di Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong tinggi. Hingga saat ini,

Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya meningkatkan kualitas sekolah dan tenaga pendidik, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sarana.

Tabel 5. Perencanaan Sekolah Unggulan untuk Kabupaten di Kalimantan Utara

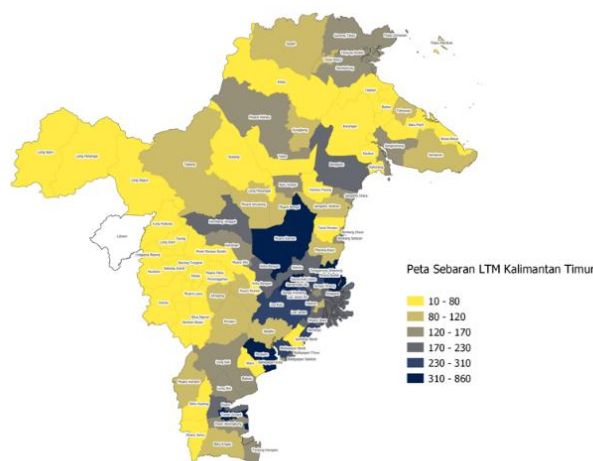
Kab/Kota	Sekolah Unggulan
Nunukan	Sekolah Garuda 1
Bulungan	Sekolah Garuda 2
Malinau	Sekolah Garuda 3
Tarakan	-
Tana Tidung	Sekolah Garuda 4

Untuk pembangunan sekolah unggulan itu sendiri lebih diprioritaskan pembangunan sekolah di Kabupaten Nunukan tepatnya pada Kecamatan Tulin Onsoi karena pada daerah tersebut masih sedikit satuan pendidikannya dan tingkat LTM masih tergolong tinggi. Oleh karena Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi oleh hutan hujan tropis, pegunungan, dataran rendah, dan daerah aliran sungai yang luas, serta sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan lebat yang menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan, akan lebih baik untuk membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan model asrama agar memudahkan kegiatan belajar mengajar.

Dari analisis tersebut, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi di Provinsi Kalimantan Utara hanya didirikan pada empat kabupaten saja, diantaranya adalah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Untuk Kabupaten Tarakan tidak perlu didirikan sekolah unggulan karena pada daerah tersebut sudah cukup memadai untuk satuan pendidikan dan rasio peserta didik dengan tenaga pendidik, selain itu, LTM nya juga masih tergolong normal.

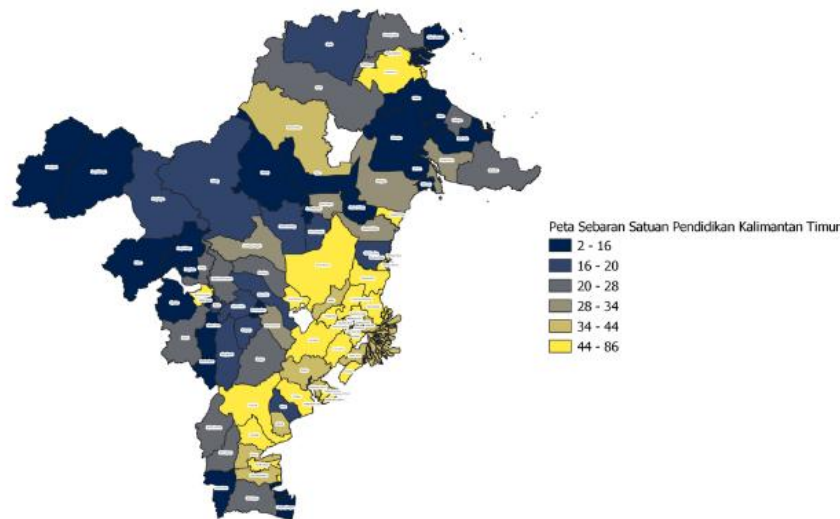
Provinsi Kalimantan Timur

Secara keseluruhan Kalimantan Timur memiliki persebaran LTM yang rendah, begitu juga dengan jumlah satuan pendidikannya.



Gambar 10. *Heatmap* Sebaran Jumlah LTM Tiap Kecamatan di Kalimantan Timur

Peta persebaran satuan pendidikan tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki jumlah tenaga pendidik yang bervariasi dan semakin banyak pada daerah sekitar Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser.



Gambar 11. *Heatmap* Sebaran Jumlah Satuan Pendidikan Tiap Kecamatan di Kalimantan Timur

Visualisasi persebaran LTM tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan cenderung sedikit.

Tabel 6. Perencanaan Sekolah Unggulan untuk Kabupaten di Kalimantan Timur

Kab/Kota	Sekolah Unggulan
Balikpapan	Sekolah Garuda 1
Berau	Sekolah Garuda 2
Bontang	Sekolah Garuda 3
Kutai Barat	Sekolah Garuda 4
Kutai Kartanegara	Sekolah Garuda 5
Kutai Timur	Sekolah Garuda 6
Mahakam Ulu	Sekolah Garuda 7
Paser	Sekolah Garuda 8
Penajam Paser Utara	Sekolah Garuda 9
Samarinda	Sekolah Garuda 10

Hingga saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan infrastruktur sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya ini dilakukan seiring dengan perkembangan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, termasuk di wilayah 3T. Seiring dengan dibangunnya infrastruktur yang memadai,

pengadaan bus sekolah untuk membantu siswa dalam menempuh perjalanan menuju sekolah perlu dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Satuan pendidikan dengan rasio dan fasilitas yang memadai sebaiknya fokus pada peningkatan kualitas. Kemudian, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi hendaknya dilakukan dengan metode *regrouping* untuk menekan biaya pendidikan sekaligus upaya efisiensi fasilitas pendidikan yang pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Lokasi sekolah unggulan terintegrasi sebaiknya difokuskan pada daerah dengan satuan pendidikan yang relatif sedikit dengan jumlah LTM yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas. Pada sekolah unggulan terintegrasi, perlu dilakukan pengadaan bus sekolah guna menunjang transportasi siswa menuju satuan pendidikan sehingga aspek keterjangkauan wilayah dapat terpenuhi. Bagi daerah dengan bentang alam yang kurang memungkinkan untuk frekuensi perjalanan yang lebih sering, seperti perairan, hendaknya model sekolah unggulan terintegrasi dilengkapi dengan asrama, seperti di Kabupaten Kotabaru. Keseluruhan analisis ini berfokus pada mutasi merata bagi tenaga pendidik, tetapi dengan pemberian insentif yang sepadan. Sesuai dengan yang diatur Dalam RPJMN tahun 2024-2029, pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu opsi apabila siswa tidak memungkinkan untuk tinggal di asrama. Misalnya terdapat suatu kondisi siswa yang memiliki kewajiban atau tanggungan terhadap keluarga sehingga tidak dapat meninggalkan keluarganya dibuat.

PENGHARGAAN/UCAPAN TERIMA KASIH

Segenap penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang memungkinkan penyelesaian penelitian ini, serta menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada orang tua dan keluarga atas dukungan dan doa yang tiada henti. Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan Bapak Bondi Arifin, PhD. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Ekonomi Kewilayahan, yang memberikan arahan kritis dalam menganalisis pemetaan sekolah unggulan. Kami juga berterima kasih kepada sesama rekan tim penulis, atas kerja sama tim yang solid dan kontribusi dalam setiap fase proyek akhir semester ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, N. (2012). *Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia*. Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia, 515.
- Amka, Mirnawati, Utomo, & Ekasari Kusumastuti, D. (2019). *Kontribusi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi*. *Sagacious Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial*, 5(2), 91–96. www.jurnalsagacious.net
- Arbianti, S., & Suchaina. (2025). *Peran Pendidikan dan Kesehatan dalam Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia : Pendekatan Human Capital*. 1(1), 54–64.
- Arifin, B., Horisonta, S., Juanda, J., Rahman, A. B., Julihandono Sj, C., Atmodjo, S. Y. P., & Maulida, A. (2024). *Infrastruktur Konektivitas, Peran Pemerintah, dan Perkembangan Sosial Ekonomi Regional: Bukti dari Kalimantan*. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 7(1), 13–26. <https://doi.org/10.35166/jipm.v7i1.5>
- Ayuningtyas, I. (2021). *Ketimpangan Akses Pendidikan Di Kalimantan Timur*. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>
- Erowati, M. T., Slameto, & Wasitohadi. (2018). *Evaluasi Program Regrouping Sekolah Dasar Negeri*. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 152–164. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2018.v5.i2.p152-164>
- Hamzah, F., Rosyadi, R., & Kartika, M. (2017). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Gender Gap dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 77. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22985>
- Indrayani, L. (2013). *Efektivitas Implementasi Regrouping*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(1).
- Komarudin, T. S., & Shofiyyah, N. A. (2023). *Model Pengembangan Sekolah Unggul*. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 3814–3824.
- Mariyadi, Slamet Subiyantoro, & Sukarno. (2023). *The Causes and Impact of Public Elementary School Regrouping*. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 7(3), 579–589. <https://doi.org/10.23887/jisd.v7i3.57063>
- Mendikbud. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 47 Tahun 2023 Tentang Standar pengelolaan Pendidikan*. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, 1–16. https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20230810_163641_2023pmkemdikbud47.pdf
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 58(12), 7250–7257.
- Muhdi, M., Kastawi, N. S., Yuliejantiningasih, Y., & Sunandar, S. (2020). *Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kendal Menuju Pengelolaan Pendidikan yang Efisien*. *Warta LPM*, 23(2), 129–140. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.9911>
- Octavia, L. S., Ulfatin, N., & Arifin I. (2018). *Proses Transisi Budaya Organisasi pada Sekolah Regrouping*. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 3 (11), 1405–1410.

-
- Pora, E. A., Neno, F. E., & Ege, E. D. (2023). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Sekolah menggunakan Metode Arcview GIS. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 5(02), 295-309. <https://doi.org/10.53863/kst.v5i02.941>
- Puspa, C. I. S., Rahayu, D. N. O., & Parhan, M. (2023). *Transformasi Pendidikan Abad 21 dalam Merealisasikan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045*. 7(5), 3309–3321. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.5030>
- Rosani, M., Lestari, N. D., & Valianti, R. M. (2025). *Transformation of Education to Welcome the Golden Generation of Indonesia 2045*. 10(1), 407–427. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v10i1.18895>
- Salsabila, A. B., & Rudiman. (2021). Pemetaan Persebaran Sekolah Muhammadiyah di Samarinda Menggunakan Metode K-means berbasis GIS. *Borneo Student Research*, 3(1), 1114-1124.
- Sudiyono. (2009). *Regrouping Sebagai Upaya Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Pendidikan*. 355–363.
- Sumintono, B. (2013). *Sekolah Unggulan: Pendekatan Pengembangan Kapasitas Sekolah*. 2(April), 33–43.
- Suryahartati, D., & Mahardika, J. (2025). *Reforming the Legal Framework of Notary Supervision in Indonesia: Towards a Digital Governance Model*. 14(1), 89–110. <https://doi.org/10.14421/2xx8sn14>
- Suryani Octavia, L., Ulfatin, N., & Arifin, I. (2018). *Proses Transisi Budaya Organisasi pada Sekolah Regrouping*. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(11), 1405–1410. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/11748>
- Undang, G. (2024). *Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah di Indonesia*. 7(1), 121–130. <http://dx.doi.org/10.15575/jt.v7i1.35000>
- Widjaja, S. (2020). *Sekolah Unggulan*. *Sekolah Unggulan*, 12, 1–12.
- Valentina, A., & Elsera, M. (2023). *Analisis Ketahanan Sosial Masyarakat “Nusantara” Dalam Pembangunan Ibukota Negara*. 9(1), 39–52.

LAMPIRAN

1. Regrouping Sekolah Unggulan Kalimantan Tengah

Kabupaten	Sekolah Unggulan	Nama Sekolah
Barito Selatan	Sekolah Garuda 1	SD Negeri 1 Damparan
		SD Negeri 2 Damparan
		SD Negeri 2 Mengkatip
		SD Negeri 3 Mengkatip
		SMP Negeri 1 Jenamas
		SMAN 1 Jenamas
Barito Timur	Sekolah Garuda 2	SD Negeri 6 Ampah
		SD Negeri Batu Sahur
		SD Negeri Muluh
		SD Negeri Netampin
Barito Utara	Sekolah Garuda 3	SMP Negeri Satu Atap 2 Dusun Tengah
		SD Negeri 1 Baok
		SD Negeri 1 Berong
		SD Negeri 1 Lampeong II
		SD Negeri 1 Linon Besi I
		SD Negeri 2 Lampeong II
Gunung Mas	Sekolah Garuda 4	SMP Negeri 1 Gunung Purei
		SMA Negeri 1 Teweh Baru
		SD Negeri 2 Petak Bahandang
		SD Negeri Tumbang Hakau
		SD Negeri Tumbang Manyangan
		SD Negeri Tumbang Tariak
Kapuas	Sekolah Garuda 5	SDN 3 Tewah
		SMP Negeri 5 Tewah
		SMP Negeri 2 Tewah
		SMAN 1 Manuhing Raya
		SD Negeri 1 Lamunti Baru
		SD Negeri 1 Lamunti Permai
Katingan	Sekolah Garuda 6	SD Negeri 1 Tumbang Mangkutup
		SD Negeri 1 Tumbang Muroi
		SD Negeri 3 Danau Rawah
		SD Negeri 4 Danau Rawah
		SMP Negeri 7 Mantangai Satu Atap
		SMA Negeri 1 Kapuas Murung
Kotawaringin Barat	Sekolah Garuda 7	SD Negeri 1 Tumbang Baraoi
		SD Negeri Tumbang Habangoi
		SD Negeri Tumbang Papi
		SD Negeri Tumbang Tangoi
		SMP Negeri 1 Petak Malai
		SMP Negeri 2 Petak Malai
Kotawaringin Timur	Sekolah Garuda 8	SMP Negeri 3 Petak Malai
		SMAN 1 Petak Malai
		SD Negeri - 1 Kenambui
		SD Negeri - 1 Natai Baru
		SD Negeri - 1 Sulung
		SD Negeri - 2 Kumpai Batu Bawah
Lamandau	Sekolah Garuda 9	SD Negeri - 2 Medang Sari
		SMP Negeri 2 Arut Selatan
		SMP Negeri 6 Arut Selatan
		SMP Negeri 7 Arut Selatan
		SMAN 2 Pangkalan Bun
		SD Negeri 1 Tanah Putih
Murung Raya	Sekolah Garuda 10	SD Negeri 2 Tanah Putih
		SD Negeri 3 Tanah Putih
		SD Negeri 4 Tanah Putih
		SD Negeri 6 Tanah Putih
		SMP Negeri 3 Kota Besi
		SMP Negeri 6 Kota Besi
Pulang Pisau	Sekolah Garuda 11	SMP Negeri 5 Bulik
		SMP Negeri Satu Atap 7 Bulik
		SMP Negeri Satu Atap 8 Bulik
		SMAN 2 Nanga Bulik
		SMAN 3 Nanga Bulik
		SD Negeri Nanga Kemujan
Seruyan	Sekolah Garuda 12	SD Negeri Nanga Koring
		SD Negeri Nanga Palikodan
		SD Negeri 2 Bahitom
		SD Negeri Malasan 1
		SMP Negeri 4 Murung
		SD Negeri 2 Mangkoliso
Sukamara	Sekolah Garuda 13	SD Negeri Dirung Bakung 2
		SD Negeri Tumbang Balo 1
		SD Negeri Tumbang Balo 2
		SD Negeri Bereng 1
		SD Negeri Mantaren 2
		SD Negeri Mantaren 3
Palangkaraya	Sekolah Garuda 14	SD Negeri Trisari 2
		SD Negeri Trisari 4
		SD Negeri Upt Anjir Pulang Pisau
		SMP Negeri 1 Kahayan Hilir
		SMP Negeri 3 Kahayan Hilir
		SMAN 2 Pulang Pisau
Palangkaraya	Sekolah Garuda 14	SD Negeri Tangga Batu
		SD Negeri 1 Panca Jaya
		SD Negeri 1 Suka Maju
		SD Negeri 1 Suka Makmur
		SD Negeri 1 Sukamandang
		SD Negeri Mugi Panyuhu
Palangkaraya	Sekolah Garuda 14	SMP Negeri 2 Seruyan Tengah
		SMP Satu Atap 4 Seruyan Tengah
		SDN Pempaning
		SD Negeri Teruntum
		SD Negeri 2 Natai Sedawak
		SD Negeri Karta Mulia 2
Palangkaraya	Sekolah Garuda 14	SD Negeri Petarikan 2
		SMP Negeri 2 Sukamara
		SMPN 4 Satap Sukamara
		SD Negeri 1 Petuk Katimpun
		SD Negeri 10 Palangka
		SD Negeri 12 Palangka

		SD Negeri 14 Palangka			SD NEGERI 2 TANJUNG KUNYIT
		SD Negeri 2 Palangka			SD NEGERI MARADAPAN
		SD Negeri 3 Menteng			SMP NEGERI 2 PULAU LAUT BARAT
		SD Negeri 4 Bukit Tunggal			SMP NEGERI 2 PULAU SEBUKU
		SD Negeri 7 Palangka			SMP NEGERI 3 PULAU LAUT KEPULAUAN
		SD Negeri 8 Menteng			SMAN 1 PULAU LAUT KEPULAUAN
		SD Negeri Percobaan			SMP NEGERI 12 BANJARBARU
		SMP Negeri 3 Palangkaraya			SMP NEGERI 10 BANJARBARU
		SMA Negeri 5 Palangka Raya			SMP NEGERI 15 BANJARBARU
		SMAN 4 Palangka Raya			SMAN 5 BANJARBARU
					+ mendirikan SD baru
					SD NEGERI BELITUNG SELATAN 9
					SD NEGERI BASIRIH 10
					SD NEGERI PENGAMBANGAN 10
					SD NEGERI TELUK DALAM 10
					SD NEGERI KUIN SELATAN 5
					SD NEGERI KELAYAN TENGAH 2
					SD NEGERI TELUK DALAM 11
					SMP NEGERI 22
					SMP NEGERI 32
					SMAN 12 BANJARMASIN
					SD NEGERI BALAWAIAN HILIR
					SD NEGERI PIPITAK JAYA 1
					SD NEGERI PIPITAK JAYA 2
					SD NEGERI HAKIT
					SD NEGERI LALAPIN
					SD NEGERI PUNCAK HARAPAN
					SMP NEGERI 2 PIANI
					SMP NEGERI 1 LOKPAIKAT
					SMAN 1 Piani
					SD KECIL PARAMASAN ATAS
					SD KECIL REMO
					SD NEGERI REMO
					SD NEGERI PARAMASAN BAWAH 2
					SD NEGERI RAMPAN
					SMP NEGERI 1 PARAMASAN
					SMP NEGERI 1 TELAGA BAUNTUNG
					SMAN 1 Paramasan
					SD NEGERI TAPUS
					SMP NEGERI 2 KUSAN HULU
					SMP NEGERI 2 SATU ATAP KURANJI
					SMAN 1 Kuranji
					SDN PADANGIN
					SMP NEGERI 2 MUARA HARUS
					SMAN 1 MUARA HARUS
					SD NEGERI 1 SEI RUKAM II
					SD NEGERI KAYU GATAH
					SD NEGERI SEI RUKAM I.2
					SD NEGERI TAMUNTI
					SMP NEGERI 1 PUGAAN
					SMP NEGERI 2 PUGAAN
					SD NEGERI 1 MASINGAI II
					SD NEGERI SUNGAI RUMBIA

2. Regrouping Sekolah Unggulan Kalimantan Selatan

Kabupaten	Sekolah Unggulan	Rincian Gabungan Sekolah
Barito Kuala	Sekolah Garuda 1	SD NEGERI SAWAHAN 2
		SD NEGERI SAWAHAN
		SD NEGERI BAHANDANG 2
		SD NEGERI SAMPURNA 2
		SD NEGERI JAMBU BARU 2
		SD NEGERI TAMBA JAYA
		SD NEGERI JAMBU BARU 1
		SMP NEGERI 2 CERBON
		SMP NEGERI 4 MANDASTANA
		SMP NEGERI 3 KURIPAN
		SMAN 1 JEJANGKIT
		SD NEGERI 1 BATU TANGGA
		SD NEGERI 2 BATU TANGGA
		SD NEGERI KECIL BATU PERAHU
Hulu Sungai Tengah	Sekolah Garuda 2	SD NEGERI KECIL JUHU
		SD NEGERI MUARA HUNGI
		SD NEGERI PEMBAKULAN
		SD NEGERI SUMBAI
		SMP NEGERI 24 HULU SUNGAI TENGAH
		SMP NEGERI 30 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH
		SMP NEGERI 34 SATU ATAP HULU SUNGAI TENGAH
		SMAN 9 BARABAI
		SD NEGERI BEPARA
		SD NEGERI SALINO
		SDN TANAH RATA
		SDN 2 RANTAU BUDA
		SDN PEMBELACANAN
		SD NEGERI 2 PANTAI BARU
Kotabaru	Sekolah Garuda 3	SD NEGERI 2 TAMIANG
		SMP NEGERI 3 KELUMPANG SELATAN
		SMP NEGERI 2 PULAU LAUT TENGAH
		SMAN 1 KELUMPANG UTARA
		SD NEGERI SEPAGAR
		SD NEGERI BELAMBUS
		SD NEGERI TANJUNG SERUDUNG
	Sekolah Garuda 4	SD NEGERI 1 TANJUNG KUNYIT
		SD NEGERI TANJUNG LALAK UTARA

Hulu Sungai Selatan	Sekolah Garuda 11	SD NEGERI 1 SIRIH HULU
		SD NEGERI 3 BAGO TANGGUL
		SD NEGERI TAMBINGKAR
		SD NEGERI 1 SUNGAI PINANG
		SD NEGERI HABIRAU
		SD NEGERI MUNING BARU
		SD NEGERI MUNING DALAM
		SMP NEGERI 4 DAHA SELATAN
		SMP NEGERI 5 DAHA SELATAN
		SMPN 6 DAHA SELATAN SATU ATAP
Tanah Laut	Sekolah Garuda 12	SMPN 7 DAHA SELATAN SATU ATAP
		UPTD SD NEGERI 1 HANDIL NEGARA
		UPTD SD NEGERI 2 HANDIL NEGARA
		UPTD SD NEGERI 2 PADANG LUAS
		UPTD SD NEGERI 2 TAMBANG SARINAH
		UPTD SD NEGERI KALI BESAR
		UPTD SMP NEGERI 2 TAMBANG ULANG
		SMA NEGERI 1 TAMBANG ULANG
		SD KECIL Ambata
		SD KECIL AMBATUNIN
Balangan	Sekolah Garuda 13	SD KECIL KURIHAI
		SD KECIL MABULAN
		SD KECIL Tampuan
		SD KECIL Tanjungan Jelamu
		SMP NEGERI 6 HALONG SATU ATAP
		SMAN 2 HALONG
Hulu Sungai Utara	Sekolah Garuda 14	SD NEGERI BANUA HANYAR 1
		SD NEGERI BANUA HANYAR 2
		SD NEGERI NELAYAN
		SD NEGERI PASAR SABTU
		SD NEGERI SUNGAI TABUKAN
		SD NEGERI AMBAHAI
		SD NEGERI TAMPANG
		SMP NEGERI 5 DANAU PANGGANG
		SMAN 1 PAMINGGIR

3. Regrouping Sekolah Unggulan Kalimantan Timur

Kabupaten	Sekolah Unggulan	Rincian Gabungan Sekolah
Balikpapan	Sekolah Garuda 1	SD NEGERI 014 BALIKPAPAN TIMUR
		SD NEGERI 016 BALIKPAPAN BARAT
		SMP NEGERI 26 BALIKPAPAN
		SMP NEGERI 19 BALIKPAPAN
		SD NEGERI 027 BALIKPAPAN UTARA
Berau	Sekolah Garuda 2	SD NEGERI 001 PULAU BESING
		SD NEGERI 001 MELATI JAYA
		SD NEGERI 001 SAMBAKUNGAN
		SD NEGERI 001 PEGAT BATUMBUK
		SMP NEGERI 2 PULAU DERAWAN
Bontang	Sekolah Garuda 3	SD NEGERI 002 LONG LANUK
		SD NEGERI 015 BS (Ex.SELANGAN)
		SD NEGERI 004 BONTANG BARAT
		SD NEGERI 016 BS KECIL (Ex.TIHI-TIHI)

Kutai Barat	Sekolah Garuda 4	SD NEGERI 007 JEMPANG
		SD NEGERI 001 Tanjung Isuy
		SMP NEGERI 4 PULAU LANTING
		SD NEGERI 004 JEMPANG
		SD NEGERI 009 JEMPANG
Kutai Kertanegara	Sekolah Garuda 5	SD NEGERI 023 MUARA KAMAN
		SD NEGERI 014 MUARA KAMAN
		SD NEGERI 015 MUARA KAMAN
		SD NEGERI 030 MUARA KAMAN
		SMP NEGERI 1 MUARA KAMAN
		SD NEGERI 031 MUARA KAMAN
		SD NEGERI 032 MUARA KAMAN
Kutai Timur	Sekolah Garuda 6	SD NEGERI 016 BENGALON
		SD NEGERI 002 BATU AMPAR
		SD NEGERI 001 BATU AMPAR
		SD NEGERI 006 BENGALON
		SD NEGERI 018 BENGALON
		SMP NEGERI 2 TELEN
		SMPN 2 Long Pahangai
Mahakam Ulu	Sekolah Garuda 7	SD NEGERI 009 LONG MERAH
		SD NEGERI 010 RUKUN DAMAI
		SDN 011 BATOO KELO
		SD NEGERI 008 long hurai
		SD NEGERI 004 LONG ISUN
Paser	Sekolah Garuda 8	SDN 008 Datah Maring
		SMP NEGERI 13 TANAH GROGOT
		SD NEGERI 023 KUARO
		SD NEGERI 015 KUARO
		SD NEGERI 013 TANAH GROGOT
		SD NEGERI 034 TANAH GROGOT
		SDN 030 TANAH GROGOT
Penajam Paser Utara	Sekolah Garuda 9	SDN 015 TANAH GROGOT
		SMP NEGERI 24 PENAJAM PASER UTARA
		SMP NEGERI 16 PENAJAM PASER UTARA
		SD NEGERI 008 PENAJAM
		SD NEGERI 031 PENAJAM
Samarinda	Sekolah Garuda 10	SD NEGERI 036 PENAJAM
		SD Negeri 006 Samarinda Utara
		SD Negeri 006 Palaran
		SD Negeri 012 Palaran
		SD Negeri 002 Samarinda Ulu
		SMP Negeri 39 Samarinda
		SD Negeri 023 Samarinda Utara
		SD Negeri 021 Sungai Kunjang

4. Regrouping Sekolah Unggulan Kalimantan Utara

Kab/Kota	Sekolah Unggulan	Rincian Gabungan Sekolah
Nunukan	Sekolah Garuda 1	SD NEGERI 001 KRAYAN TIMUR
		SD NEGERI 002 KRAYAN TENGAH
		SD NEGERI 003 KRAYAN BARAT
		SD NEGERI 005 KRAYAN
		SD NEGERI 005 KRAYAN TIMUR

Sekolah Garuda 3	SD NEGERI 42 NANGA TAYAP	Sekolah Garuda 7	SD NEGERI 16 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 43 NANGA TAYAP		SD NEGERI 17 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 44 NANGA TAYAP		SD NEGERI 20 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 04 MANIS MATA		SD NEGERI 21 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 06 MANIS MATA		SD NEGERI 22 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 07 MANIS MATA		SD NEGERI 23 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 09 MANIS MATA		SD NEGERI 30 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 11 MANIS MATA		SD NEGERI 32 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 13 MANIS MATA		SD NEGERI 33 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 14 MANIS MATA		SD NEGERI 35 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 16 MANIS MATA		SD NEGERI 36 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 17 MANIS MATA		SD NEGERI 37 TUMBANG TITI
Sekolah Garuda 4	SD NEGERI 18 MANIS MATA	Samas	SD NEGERI 38 TUMBANG TITI
	SD NEGERI 19 MANIS MATA		SDN 01 TEBAS
	SD NEGERI 20 MANIS MATA		SDN 34 MENSERE
	SD NEGERI 21 MANIS MATA		SDN 50 SUKA DAMAI
	SD NEGERI 22 MANIS MATA		SDN 15 KARTIASA
	SD NEGERI 25 MANIS MATA		SDN 17 SATAI
	SD NEGERI 27 MANIS MATA		SDN 23 TENGGILING
	SD NEGERI 28 MANIS MATA		SDN 05 SEGERUNDING
	SD NEGERI 30 MANIS MATA	Kuburaya	SD NEGERI 05 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 31 MANIS MATA		SD NEGERI 10 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 33 MANIS MATA		SD NEGERI 12 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 34 MANIS MATA		SD NEGERI 16 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 36 MANIS MATA		SD NEGERI 31 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 37 MANIS MATA		SD NEGERI 34 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 39 MANIS MATA		SD NEGERI 36 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 40 MANIS MATA		SD NEGERI 48 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 41 MANIS MATA		SD NEGERI 52 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 42 MANIS MATA		SD NEGERI 55 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 43 MANIS MATA		SD NEGERI 70 SUNGAI RAYA
	SD NEGERI 45 MANIS MATA		SDN 71 SUNGAI RAYA
Sekolah Garuda 5	SD NEGERI 08 SIMPANG HULU	Sekolah Garuda 10	SD NEGERI 04 KUBU
	SD NEGERI 12 SIMPANG HULU		SD NEGERI 11 KUBU
	SD NEGERI 15 SIMPANG HULU		SD NEGERI 24 KUBU
	SD NEGERI 16 SIMPANG HULU		SD NEGERI 31 KUBU
	SD NEGERI 17 SIMPANG HULU		SD NEGERI 33 KUBU
	SD NEGERI 19 SIMPANG HULU		SD NEGERI 41 KUBU
	SD NEGERI 22 SIMPANG HULU		SDN 42 KUBU
	SD NEGERI 24 SIMPANG HULU	Sintang	SD NEGERI 06 ENSABANG
	SD NEGERI 28 SIMPANG HULU		SD NEGERI 07 SEMUNTAI
	SD NEGERI 32 SIMPANG HULU		SD NEGERI 11 ANDONG
	SD NEGERI 33 SIMPANG HULU		SD NEGERI 13 MAIT HILIR
	SD NEGERI 34 SIMPANG HULU		SD NEGERI 28 TANAH PUTIH
	SD NEGERI 35 SIMPANG HULU		SD NEGERI 30 SILIT
	SD NEGERI 36 SIMPANG HULU		SD NEGERI 38 SUNGAI AUR
	SD NEGERI 37 SIMPANG HULU		SD NEGERI 45 SUNGAI TAMANG
Sekolah Garuda 6	SD NEGERI 05 TUMBANG TITI	Sekolah Garuda 12	SD NEGERI 16 SABANG SURAI
	SD NEGERI 08 TUMBANG TITI		SD NEGERI 22 PENJERNANG
	SD NEGERI 09 TUMBANG TITI		SD NEGERI 27 MAN'ER
	SD NEGERI 11 TUMBANG TITI		SD NEGERI 28 KRUAK
	SD NEGERI 12 TUMBANG TITI		SD NEGERI 10 KERAPA SEPAN
	SD NEGERI 14 TUMBANG TITI		SD NEGERI 12 NANGA LIDAU

Landak	Sekolah Garuda 13	SD NEGERI 16 BULUH JEGARA	SEKOLAH DASAR NEGERI 08 NANGA ERAK
		SD NEGERI 25 GURUNG PENINGKAH	
		SD NEGERI 30 BELIMBING	
		SD NEGERI 32 LUBUK LEBAN	
		SD NEGERI 34 TAPANG URIK	
	Sekolah Garuda 14	SD NEGERI 35 JAMBU	
		SD NEGERI 27 SABAH	
		SD NEGERI 30 KAYU ARA	
		SD NEGERI 31 BAKUNG	
		SD NEGERI 34 BAGOK	
		SD NEGERI 35 BABAN OGOT	
		SD NEGERI 36 UPT BAKUNG	
		SD NEGERI 37 PERIGI	
		SD NEGERI 38 SUSUANT	
		SD NEGERI 40 PANSO	
	Sekolah Garuda 15	SD NEGERI 43 MINI BATU RAYA	
		SD NEGERI 44 PELANJAU	
		SD NEGERI 08 MANGGANG	
		SD NEGERI 09 PAK LETE	
		SD NEGERI 11 PANGKALAN DURIAN	
		SD NEGERI 18 BOBOR	
		SD NEGERI 24 KOPIANG	
	Sekolah Garuda 16	SD NEGERI 29 AIR MERAH	
		SD NEGERI 31 GEDAH	
		SD NEGERI 34 SUKA RAMAI	
		SD NEGERI 01 SERIMBU	
		SD NEGERI 10 ENKGANGIN	
	Sekolah Garuda 17	SD NEGERI 13 BAREH	
		SD NEGERI 15 SEMPATE	
		SD NEGERI 17 TENGON PELAIK	
		SD NEGERI 18 DANGE AJI	
		SD NEGERI 20 PERBUAK	
		SD NEGERI 21 MERAYUH	
		SD NEGERI 22 NYAKE TEMBAWANG	
		SD NEGERI 23 ENKGADIK PADE	
	Sekolah Garuda 18	SD NEGERI 27 LIMPO	
		SD NEGERI 29 PERIJA	
		SD NEGERI 31 ENDIYAK	
		SD NEGERI 34 KUNINGAN SEMPATUNG	
		SD NEGERI 35 TANDI	
		SD NEGERI 36 TENGON UPAS	
Kapuas Hulu	Sekolah Garuda 19	SD NEGERI 19 SINTO	
		SD NEGERI 05 GAMANG	
		SD NEGERI 08 PADANG PIO	
		SD NEGERI 09 SEGONJENG	
		SD NEGERI 10 AMPADAN	
	Sekolah Garuda 20	SD NEGERI 11 BULUH	
		SD NEGERI 13 LESUNG	
		SD NEGERI 15 PELAIK KEMAYO	
		SD NEGERI 17 INSAKNG	
		SD NEGERI 18 LIMO	
	Sekolah Garuda 21	SEKOLAH DASAR NEGERI 03 KEDAMIN	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 08 NANGA ERAK	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 09 LUNSA	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 11 TANJUNG LOKANG	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 12 MELAPI	
Kapuas Hulu	Sekolah Garuda 22	SEKOLAH DASAR NEGERI 13 JARAS	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 14 SUAI	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 16 SEPAN	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 17 NANGA BUNGAN	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 18 NANGA ENAP	
	Sekolah Garuda 23	SEKOLAH DASAR NEGERI 19 NANGA BALANG	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 20 NANGA SALIN	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 21 NANGA LAPUNG	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 23 KEDAMIN	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 26 TRANS NANGA SAHUI	
Kapuas Hulu	Sekolah Garuda 24	SEKOLAH DASAR NEGERI 27 MELAPI	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 28 KEDAMIN DARAT	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 29 TANJUNG JATI	
	Sekolah Garuda 25	SD NEGERI 14 SEMANGKOK	
		SD NEGERI 22 SUNGAI ULUK PALIN	
		SD NEGERI 30 LAUK SATU	
		SDN 26 TANJUNG BERUANG	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 03 PALA PULAU	
Kapuas Hulu	Sekolah Garuda 26	SEKOLAH DASAR NEGERI 07 PUTUSSIBAU	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 08 SIBAU HILIR	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 15 MUPA	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 17 PALA PULAU	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 21 NANGA NYABAU	
	Sekolah Garuda 27	SEKOLAH DASAR NEGERI 23 BANUA TENGAH	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 25 TANJUNG KERJA	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 27 GUDANG SUAI	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 29 LAUK II	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 04 NANGA KEDUAI	
Kapuas Hulu	Sekolah Garuda 28	SEKOLAH DASAR NEGERI 05 ENTURIN	
		SEKOLAH DASAR NEGERI 08 NANGA SERAWAK	
	Sekolah Garuda 29		

Sekadau	Sekolah Garuda 24	SEKOLAH DASAR NEGERI 10 NANGA TAMAN
		SEKOLAH DASAR NEGERI 13 BUGANG
		SEKOLAH DASAR NEGERI 15 GURUNG ULAK
		SEKOLAH DASAR NEGERI 16 MENTAWIT
		SEKOLAH DASAR NEGERI 18 SUNGAI MEDANG
		SD NEGERI 13 TABAI
	Sekolah Garuda 25	SD NEGERI 16 TELUK PASIR
		SD NEGERI 19 SERIRANG
		SD NEGERI 25 GONIS RABU
		SD NEGERI 26 TERIBANG
		SD NEGERI 28 SELIMUS
		SD NEGERI 31 SEJIRAK EMPERANANG
	Sekolah Garuda 26	SD NEGERI 39 SELALONG
		SD NEGERI 41 ENSALANG
		SD NEGERI 45 SOPAN PELANGKAN
		SD NEGERI 50 NANGA GONIS
		SD NEGERI 51 SUNGAI KUNYIT
		SD NEGERI 02 PERONGKAN
	Sekolah Garuda 27	SD NEGERI 15 ROCA
		SD NEGERI 16 SUNGAI BALA
		SD NEGERI 17 NATAI ILONG
		SD NEGERI 21 JOPO
		SD NEGERI 26 MONDI
		SD NEGERI 27 LAMAU
	Sekolah Garuda 28	SD NEGERI 28 NANGA MENTERAP
		SD NEGERI 29 NANGA MENTERAP
		SD NEGERI 32 NANGA MANJANG
		SD NEGERI 36 SEPANJANG
		SD NEGERI 37 SUNGAI DURIAN
		SD NEGERI 38 TAPANG BIRAH
Mempawah	Sekolah Garuda 29	SD NEGERI 39 KIATAK
		SD NEGERI 06 SARIK
Kota Singkawang	Sekolah Garuda 30	SD NEGERI 11 PENYEBERANG BALA
		SD NEGERI 14 LEMINANG
Kayong Utara	Sekolah Garuda 31	SD NEGERI 15 NANGA RAMBIN
		SD NEGERI 18 GERINIS
		SD NEGERI 19 SELAMPONG
		SD NEGERI 20 SERIRANG
		SD NEGERI 21 TAPANG RENTONG
		SD NEGERI 29 BIANG PORING
		SD NEGERI 30 LADAK
Mempawah	Sekolah Garuda 29	SD NEGERI 32 NANGA DAKAN
		SD NEGERI 04 JONGKAT
Kota Singkawang	Sekolah Garuda 30	SD NEGERI 16 JONGKAT
		SDN 59 SINGKAWANG
Kayong Utara	Sekolah Garuda 31	SD NEGERI 04 TELUK MELANO
		SD NEGERI 08 RANGKAP
		SD NEGERI 26 MEDAN SEPAKAT
		SD NEGERI 29 PEMANGKAT
		SDN 35 TRANS MATA MATA